
**MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI RAJA PEMBARU
JAWA: ANALISIS FUNGSIONAL PADA GAYA
PEMERINTAHAN RAJA AIRLANGGA PADA ABAD
KE-11 M**

*RECONSIDERING THE REFORMER KING OF JAVA:
A FUNCTIONAL ANALYSIS OF KING AIRLANGGA
GOVERNMENT IN THE 11TH CENTURY*

Muhamad Alnoza

Program Master Antropologi, Universitas Gadjah Mada
Jln. Sosiohumaniora, No.1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
muhamadalnoza@mail.ugm.ac.id

Diterima tanggal 22 Desember 2021

Disetujui tanggal 3 Juni 2022

ABSTRACT

*This paper critically discusses Airlangga's style of government using the functional analysis approach proposed by Robert K. Merton. The problem raised in this study is how Airlangga performs his function as a king in his royal government. The study aims to find out the functions of manifest, latent functions, and dysfunctional aspects of Airlangga through the policies he issued. The method used in this qualitative research consisted of data collection through library research and data processing by analyzing and interpreting. By comparing Airlangga policy and the concept of *aṣṭabrata*, the study has found that Airlangga carried out manifest function in military and economy. In the meantime, he carried out the latent function in the international relations. Airlangga's dysfunctional aspect has shown Airlangga's lack of functioning as the symbol of the glory of a country and the guardian of the kingdom's internal stability. Therefore, the novelty of the research is Airlangga's position as a dysfunctional figure in one of the aspects that a king was supposed to own.*

Keywords: *Airlangga, functional analysis, *aṣṭabrata*, and policy.*

ABSTRAK

Tulisan ini membahas secara kritis gaya pemerintahan Airlangga dengan menggunakan pendekatan analisis fungsional yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Airlangga menjalankan fungsinya sebagai raja dalam struktur pemerintahan kerajaannya. Masalah tersebut berusaha dijawab dalam rangka mengetahui fungsi manifes, fungsi laten, dan aspek *disfungsional* dari Airlangga melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini terdiri atas pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan pengolahan data dengan melakukan analisis dan interpretasi. Melalui kajian yang dilakukan dengan membandingkan kebijakan Airlangga dan konsep *aṣṭabrata*, dapat diketahui bahwa Airlangga menjalankan

fungsi manifes dalam bidang militer dan ekonomi, sedangkan fungsi laten dilakukan di bidang hubungan internasional. Aspek *disfungsional* Airlangga ditunjukkan melalui kurang berfungsinya Airlangga sebagai simbol kejayaan suatu negara dan penjaga kestabilan internal kerajaan. Oleh karena itu, kebaruan dari penelitian ini terletak pada pemosisian Airlangga sebagai sosok raja yang *disfungsional* di salah satu aspek yang harusnya dimiliki seorang raja.

Kata kunci: Airlangga, analisis fungsional, *aṣṭabrata*, dan kebijakan.

A. PENDAHULUAN

Sejak abad ke-10 M, kekuasaan Dinasti Śailendra yang pada awalnya berdiri di Jawa Tengah mulai menggeser pusat pemerintahannya ke Jawa Timur. Prasasti Canggal I (851 Ś/929 M) yang dikeluarkan oleh Śrī Maharaja Rake Hino Pu Sindok Sri Isanawikrama Dharmmotunggadewa (Raja Sindok), menjadi penanda bermulanya kekuasaan Dinasti Isana sebagai penerus Dinasti Śailendra di Jawa Timur. Setelah Raja Sindok turun takhta, kronologis sejarah masa Hindu-Buddha seakan diselimuti kegelapan.

Permasalahan utama dalam merekonstruksi sejarah pascamasa Sindok adalah raja yang berkuasa setelah masa Sindok tidak pernah ada yang mengeluarkan prasasti. Setelah masa kekuasaan Raja Sindok, prasasti baru diterbitkan lagi oleh penguasa pada masa Raja Airlangga di abad ke-11, sebagaimana diketahui dari Prasasti Cane (943 Ś/1021 M) (Posponegoro dan Notosusanto 2010:187-196). Uniknyanya selama masa kekuasaan Raja Airlangga inilah muncul prasasti yang isinya memberikan keterangan sejarah masa-masa gelap yang disebutkan sebelumnya. Prasasti yang dimaksud adalah Prasasti Pucangan berbahasa Sansekerta, yang dikeluarkan oleh raja Airlangga tahun 959 Ś atau 1037 (Susanti 2010:85-86).

Selain melampirkan uraian tentang silsilah keluarga Raja Airlangga, Prasasti Pucangan berbahasa Sansekerta juga menyebut adanya peristiwa *mahapralaya*. Dalam ajaran Hindu sendiri, istilah *pralaya* dapat dianggap bersinonim dengan “kiamat” (Wibowo 2015:16; Moniz 2015:38). *Pralaya* di dalam Prasasti Pucangan berbahasa Sansekerta, digambarkan sebagai peristiwa pertumpahan darah dan perebutan kekuasaan pascakematian Raja Dharmawangsa Tguh (mertua sekaligus paman Raja Airlangga dari pihak ibu). Airlangga dianggap sebagai raja pertama di Jawa bagian timur yang berhasil menyatukan kembali wilayahnya setelah terjadinya kekacauan akibat konflik sosial di kerajaannya (Susanti 2010:93-94).

Menurut para peneliti sejarah kuno di Jawa, Raja Airlangga dianggap sebagai sosok “raja besar” yang menandai perubahan garis sejarah kerajaan di Jawa. Susanti (2010:243-244), misalnya, menyebut Airlangga telah mengubah tradisi gaya pemerintahan pendahulunya dengan membuat jabatan-jabatan baru yang tidak ditemui di masa sebelumnya. Dalam sepanjang sejarah Jawa, Airlangga dipandang sebagai raja yang berwawasan mancanegara. Hal ini dibuktikan dengan diarahkannya orientasi kegiatan ekonomi Jawa ke arah perdagangan

melalui pelayaran laut, yang sebelumnya berpusat pada kegiatan bercocok tanam. Oleh karena perhatiannya pada aspek mobilitas laut ini, Jawa menjadi pelabuhan tempat singgah berbagai kerajaan di Asia. Schrieke (2016:12) bahkan menyebut bahwa Raja Airlangga merupakan contoh dari keberhasilan klaim raja sebagai *dewaraja*¹. Klaim ini digunakan Airlangga untuk mengatasi hambatan legitimasi dari aspek garis keturunan yang dimilikinya. Alnoza (2021:231-232), lebih lanjut menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Airlangga sebagai konsekuensi dari kontrak sosial yang diajukan Airlangga sebagai perwujudan Dewa Wisnu terhadap rakyatnya.

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai sejarah pemerintahan Airlangga, nampaknya peneliti terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek-aspek yang mengagung-agungkan kejayaan Airlangga. Belum pernah dilakukan suatu kajian yang melihat kelemahan-kelemahan apa saja yang dilakukan Airlangga selama memerintah. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menganalisis secara kritis fungsi Airlangga sebagai salah satu unsur struktur pemerintahan kerajaan di Jawa abad ke-11.

Adapun pendekatan analisis fungsional yang digunakan sebagai landasan teori penelitian adalah yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Sebagai bagian dari perkembangan dari paradigma fungsionalisme, analisis

fungsional dari Merton termasuk ke dalam teori fungsionalisme modern. Pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki kejelasan dari “keteraturan-keteraturan” secara empiris. Pendekatan ini memungkinkan menilik seberapa jauh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masing-masing unsur di dalam struktur (Merton 1968:104).

Kelebihan dari penggunaan pendekatan analisis fungsional Merton terletak pada adanya kemungkinan penetapan suatu bagian dari struktur, apakah itu bersifat fungsional (fungsi manifes dan laten) atau *disfungsional* (tidak berfungsi sama sekali). Fungsi manifes atau *intended function* adalah fungsi dari suatu unsur di dalam sistem pemerintahan yang berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi laten atau *unintended function*, yaitu fungsi dari suatu unsur di dalam sistem pemerintahan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (di luar rencana yang telah disepakati). *Disfungsional* di sini berarti terdapat unsur tertentu yang tidak menjalankan fungsi sama sekali di dalam struktur. Analisis fungsionalisme, praktis dapat digunakan untuk menilai apakah suatu struktur telah berjalan sesuai dengan fungsinya atau tidak, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur telah menciptakan ekuilibrium (keseimbangan sistem) atau belum (Merton 1968:104-109; Turner dan Maryanski 2010:116-119). Penggunaan analisis fungsionalisme Merton pada penelitian dengan demikian dilakukan karena pendekatan ini mampu menyediakan suatu sudut pandang mengenai berfungsi atau tidak berfungsinya gaya

¹ Raja sebagai perwujudan dewa di dunia (Kulke 1978).

pemerintahan Airlangga pada struktur kerajaannya.

Melalui pembahasan terhadap pendekatan analisis fungsional Merton, dihipotesiskan bahwa harusnya Airlangga telah memenuhi fungsinya sebagai raja bagi struktur kerajaannya. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk membuktikan hipotesis tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Airlangga menjalankan fungsinya sebagai raja dari sudut pandang fungsionalisme Merton? Rumusan masalah tersebut dijawab dalam rangka memenuhi tujuan dari penelitian ini, yaitu menggali informasi mengenai fungsi manifes, laten, dan *disfungsional* dari Airlangga pada struktur kerajaannya melalui kebijakan-kebijakan yang ia keluarkan.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yang tahap-tahapnya terdiri atas pengumpulan data, analisis, dan interpretasi (Somantri 2005). Pengumpulan data dalam konteks penelitian ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan, yakni dengan cara mencari dan mempelajari berbagai referensi yang berkenaan dengan data penelitian. Data penelitian yang digunakan merupakan hasil transliterasi prasasti-prasasti (maklumat) di masa Raja Airlangga yang dibaca dan dikaji secara mendalam. Selain itu, digunakan pula data kesejarahan dari kerajaan lain yang memuat perihal Airlangga dan perannya sebagai raja, seperti prasasti-prasasti yang sezaman dengan pemerintahan Airlangga atau sumber tertulis asing

yang relevan dengannya. Studi kepustakaan juga diaplikasikan pada teks naskah *Kakawin Ramayana* yang memuat laku *aṣṭabrata* atau kumpulan tugas-tugas yang secara ideal seharusnya dilakukan oleh seorang raja di masa Jawa Kuno.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan kerangka berpikir fungsionalisme (Merton 1968; Turner dan Maryanski 2010). Merton menyebutkan bahwa untuk meneliti suatu fungsi dari bagian-bagian struktur, perlu dideskripsikan terlebih dahulu bentuk struktur yang menaunginya secara empirik. Selanjutnya, peneliti menelaah pula tolok ukur pemenuhan kebutuhan struktur dari bagian-bagian struktur secara keseluruhan.

Di akhir analisis, peneliti kemudian menetapkan konsekuensi dari bagian-bagian struktur, apakah itu fungsional atau *disfungsional*. Berdasarkan penjabaran metode tersebut, maka Raja Airlangga merupakan bagian dari struktur. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan mendeskripsikan terlebih dahulu bentuk struktur kerajaan yang dipimpin Raja Airlangga beserta kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkannya.

Adapun tolok ukur yang digunakan untuk melihat pemenuhan kebutuhan struktur atas keberadaan Airlangga sebagai raja, mengacu pada sifat raja ideal dalam budaya Jawa, yaitu uraian *aṣṭabrata* di teks *Kakawin Ramayana*. Selanjutnya, kedua data ini dibandingkan satu sama lain. Komparasi dilakukan demi mencapai kesimpulan mengenai apa saja aspek yang fungsional ataupun *disfungsional* dari gaya pemerintahan Airlangga.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Pemerintahan dan Kebijakan-Kebijakan Airlangga

Airlangga berkuasa di Jawa bagian timur dari tahun 1010 M sampai dengan 1043 M. Hingga dilakukannya penelitian ini, terdapat sekitar 33 prasasti keluaran Raja Airlangga yang berhasil ditemukan kembali. Prasasti-prasasti ini tersebar di beberapa daerah di Jawa Timur, antara lain di Surabaya, Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, Lamongan, dan Tuban. Keunikan dari prasasti-prasasti masa Airlangga terletak pada sifat uraian maklumatnya yang umumnya berisi perihal *simā makudur* (Susanti 2010). *Simā makudur* adalah semacam kebijakan balas budi raja terhadap golongan-golongan sosial di masyarakat Jawa Kuno, seperti golongan agamawan, bangsawan, dan rakyat biasa, yang telah membantunya. Balas budi itu biasanya berupa penganugrahan tanah *simā*, yakni daerah otonom bebas pajak (Haryono 1999:14-15).

Penelitian ini membagi dua kategori kebijakan Airlangga, dari sekian banyak informasi yang dimuat dalam prasasti Airlangga. Dua kategori tersebut terdiri atas kebijakan dalam dan luar negeri Airlangga. Kebijakan dalam negeri Airlangga variasinya juga dibagi-bagi lagi. Ada yang berupa kebijakan kemiliteran, pembangunan fasilitas umum, perpajakan, perdagangan, dan pengaturan transportasi publik. Sedangkan di sisi lain, kebijakan luar negeri Airlangga berkaitan dengan invasi-invasi militernya ke luar negeri, pembinaan hubungan luar negeri, dan pengaturan keberadaan orang asing di negaranya melalui regulasi tertentu.

a. Kebijakan Dalam Negeri Airlangga

Kebijakan dalam negeri semasa pemerintahan Airlangga yang paling jelas terlihat adalah pemadaman pemberontakan. Kebijakan tersebut telah terjadi semenjak era pemerintahan mertuanya (Dharmawangsa Tguh). Pemadaman pemberontakan dilancarkan Airlangga secara maraton, dari semenjak tahun 1029 M hingga kira-kira tahun 1036 M.

Menurut Prasasti Pucangan berbahasa Sansekerta² dan Jawa Kuno (1037 M dan 1039 M), sasaran pengempuran Airlangga yang pertama adalah wilayah Wuratan milik Wisnu-prabhawa. Selanjutnya, Airlangga di tahun 953 Ś (1031 M) menyasar dua musuhnya sekaligus, yaitu Haji Wēngkēr dan Adhapamanuda yang wujudnya seakan menyerupai tokoh Rahwana. Di tahun 954 Ś (1032 M), Airlangga menggempur musuhnya yang digambarkan sebagai seorang perempuan yang diibaratkan seperti raksasa (tidak disebut siapa namanya). Tiga tahun kemudian, tepatnya di bulan Bhadrapada dan Karttika, Airlangga secara maraton menyerang musuhnya yang bernama Raja Wijaya. Di tahun 959 Ś (1037 M), barulah Airlangga menduduki tahta berhias intan (*ratnasinhasana*) sebagai seorang penguasa tunggal dan menaklukan seluruh wilayah timur, selatan, dan barat negaranya (Susanti 2010 98-99).

Walaupun dapat dikatakan Prasasti Pucangan berbahasa Sansekerta adalah prasasti yang paling lengkap menye-

² Prasasti ini dibedakan dengan Prasasti Pucangan berbahasa Jawa Kuno.

butkan serangan Airlangga kepada para pemberontaknya, namun bukan berarti prasasti lain tidak menyebutkan hal tersebut. Prasasti Baru yang dikeluarkan tahun 1030 M, misalnya, juga menyebut adanya penumpasan pemberontak Raja Hasin oleh Airlangga (Susanti 2010:109).

Kebijakan perekonomian dan pengaturan transportasi di masa Airlangga dapat dilihat sebagai kesatuan sinergi. Sebagaimana diketahui, Airlangga adalah raja Jawa pertama yang secara terang-terangan membuat kebijakan pelabuhan laut. Selama masa pemerintahannya, Airlangga membangun dua pelabuhan besar di Jawa Timur, yaitu pelabuhan Hujung Galuh (diperkirakan di muara Sungai Kelagen, Surabaya) dan Kambang Putih (diperkirakan sekarang di daerah Tuban). Informasi mengenai pembangunan dua pelabuhan tersebut diperoleh dari Prasasti Kamalagyan (1037 M) dan Kambang Putih yang dikeluarkan oleh penguasa penerus Airlangga (Posponegoro dan Notosusanto 2010:208-209).

Casparis (1958:19-20) berpendapat bahwa pelabuhan Hujung Galuh dimanfaatkan sebagai pelabuhan penghubung antarpulau (kepulauan Nusantara bagian timur), sedangkan Kambang Putih digunakan sebagai pelabuhan internasional mengingat letaknya yang condong ke barat (mendekati Benua Asia Daratan). Dengan demikian, Airlangga dapat dikatakan berusaha melebarkan sayap distribusi komoditas produksinya ke pasaran internasional demi mendulang keuntungan yang lebih besar. Usaha yang dilakukan oleh Airlangga tersebut

merupakan bentuk fasilitasi para kaum *baṇḍigrāma* atau kongsi-kongsi dagang. Harapannya, para kaum *baṇḍigrāma* tersebut menjadi kerasan untuk singgah dan berdagang di Jawa (Prihatmoko 2014:165).

Kebijakan dalam negeri lain dari Raja Airlangga adalah pembangunan fasilitas umum. Fasilitas umum di sini diartikan sebagai fasilitas-fasilitas yang digunakan secara kolektif oleh publik, yang biaya pembuatannya melibatkan kas negara. Adapun fasilitas publik yang paling sering dibangun adalah bangunan suci atau rumah ibadah, seperti candi, pertapaan, dan *pathirtan* (pemandian suci). Salah satu yang paling terkenal adalah sebagaimana yang ditulis dalam Prasasti Pucangan berbahasa Sansekerta sebagai berikut:

Alih aksara:

...*nirjityātha*
ripūnparākramadhanāt
chauryyairupāyairapi śaktyākhanò
itayā khalu vratitayā vā devatā
rāadhanai rantuñjātamahānròpassa
kurute puṇyāśramam śrimatahò
pārśve pūgavato
girernarapatiśśrīnīralaEgāhvayahò
Śrònòvanto
ājakīyāśramamasamamimannandan
odyānadeśyaEgacchantassantatan
tepyahamahamikayā
vismayālolanetrā(m)ālādiprītikārās
stutimukharamukhā
mukhyametannròpānòāmmanīnammany
amānā manumiva mahasā
mānanīyavvruvanti sādihūnāmpathi
yātu paurasamitirdharmyā
gatirmantrīnòāmbhūyādbhūtahitesòinòò
munijanā itthannròpe prārthanā
yasmiñjīvati rājñi raksòati
bhuvandharmenòā siddhyanti te

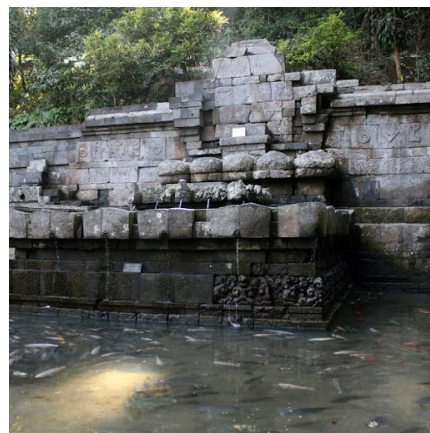
*tasmācchrījalalaEgadevanrōpatirdīg
ham sa jīvyāditi//* (Kern 1917:105).

Alih bahasa:

Setelah jatuh para musuhnya dengan kekuatan kebesaran jiwa, karena perilaku kesatria dan berbagai gaya pemerintahannya, maka Sri Paduka Airlangga yang sekarang telah menjadi raja agung menitahkan agar dibuatkan suatu pertapaan di lereng Gunung Pugawat³ yang elok lagi membahagiakan, baik untuk menunjukkan kuasanya maupun ketepatan janjinya yang tidak dapat dilanggar untuk memuaskan dan menyenangkan dewata. Mendengar akan pertapaan yang tidak kalah dengan Taman Indra ini, orang berbondong-bondong mengunjunginya dan melihat dengan rasa takjub; mereka datang membawa karangan bunga dan lain-lain sebagai bukti kegembiraan serta memuji-muji raja yang hebat ini, yang mereka anggap sebagai sang mentari di antara penguasa yang perkasa dan karena keunggulannya ini ia layak dipuja sebagai *manu*. Semoga rakyat senantiasa ada di jalan darma! Semoga para pertapa berusaha keras bagi kemakmuran dan kebahagiaan seluruh makhluk! Dan bertahan dengan raja pribadi, doa kami adalah: “Karena berkat akan hidup dan pemerintahan negara Airlangga, sehingga semua berkembang dalam keadilan, karena itu semoga Sri Airlangga Dewa panjang umur! (Kern 1917:96).⁴

Selain membuat pertapaan bagi rakyatnya di Gunung Pugawat sebagai

bangunan suci, secara arkeologis juga ditemukan suatu bangunan suci yang masih utuh secara fisik dari masa Airlangga. Bangunan suci itu adalah Pathirtan Jalatunda di lereng barat Gunung Penanggungan. Bangunan *pathirtan* tersebut berupa kolam dengan pancuran yang dihiasi dengan berbagai relief dan arca masa peralihan budaya Hindu-Buddha Jawa Tengah ke budaya Hindu-Buddha Jawa Timur (Santiko 2015:88-89).



Gambar 1. *Pathirtan* Jalatunda sebagai salah satu fasilitas publik yang dibangun Airlangga. Sumber: cagarbudaya.kemdikbud. go.id.

Airlangga juga membangun fasilitas yang bersifat profan, yang di antaranya berupa waduk. Waduk yang dibangun Airlangga dikenal sebagai *waringin pitu*, sebagaimana disampaikan dalam Prasasti Kamalagyan (1037 M). Selain digunakan sebagai sumber air bagi rakyat yang tinggal di sekitarnya, ada kemungkinan bahwa waduk ini digunakan sebagai bentuk antisipasi bencana dari Airlangga bagi rakyatnya (Susanti 2010:53).

b. Kebijakan Luar Negeri Airlangga

Berdasarkan prasasti-prasasti yang dikeluarkan Airlangga, dapat diketahui bahwa wilayah Airlangga juga dihuni sekumpulan warga asing. Orang-orang

³ Diperkirakan sekarang Gunung Penanggungan, Mojokerto.

⁴ Melalui terjemahan penulis, dari alih bahasa asli Hendrik Kern yang berbahasa Belanda.

asing tersebut dikelompokkan sebagai *wargga kilalan*. *Wargga kilalan* secara harfiah berarti orang yang dikenai pajak karena profesi yang diembannya.

Penggolongan orang ini rupanya juga ditujukan untuk orang asing di Jawa. Orang-orang asing di masa Airlangga di antaranya, *kliṇ* (bangsa Tamil dari India), *āryyā* (bangsa Arya dari India), *siṇhala* (bangsa dari Sri Lanka), *paṇḍikira* (bangsa dari India), *dravida* (bangsa dari India Selatan), *cēmpa* (bangsa Cham dari Vietnam Selatan), *rēmēn* (bangsa Mon dari Myanmar), dan *kmīr* (bangsa Khmer dari Kamboja). Umumnya mereka datang untuk berdagang dan singgah di Jawa dalam suatu siklus tertentu (Ratnawati 1995:18-23).

Beberapa catatan sejarah asing juga sedikit banyak menginformasikan kebijakan pembinaan hubungan luar negeri Airlangga. Kronik *Sejarah Dinasti Song* (buku 489), misalnya, menyebut bahwa Jawa adalah rekanan dagang Dinasti Song di Cina. Menurut kronik tersebut, beberapa kali orang Jawa mengirim utusan untuk menyampaikan upeti kepada kaisar di Cina sebagai upaya mempererat hubungan diplomatik kedua belah pihak.

Hubungan dagang ini bahkan menyebabkan Cina memiliki catatan rinci mengenai komoditas-komoditas apa saja yang diekspor Jawa saat itu ke pasaran internasional. Mereka menyebut bahwa Jawa merupakan penghasil beras, emas, perak, cula badak, gading, gaharu, cendana, adas manis, lada, pinang, dan kayu secang. Begitu intensnya hubungan dagang Cina dan Jawa ketika itu sampai-

sampai disebutkan pula pajak yang diambil dari cukai dagang. Besaran pajaknya sekitar satu *qian* atau sepersepuluh ons emas atau setara dengan dua seperlima pikul padi (Groeneveldt 2018:19-20).

Selain bekerja sama dengan negara di luar Nusantara, Airlangga juga membina hubungan baik dengan kerajaan ayahnya (Udayana) di Bali. Setelah mangkatnya Raja Udayana di Bali, suksesi kerajaan rupanya diserahkan kepada dua adik kandung Airlangga secara bergiliran, yaitu Raja Marakata (1022-1049 M) dan Anak Wungsu (1049-1077 M). Oleh karena adanya hubungan kekerabatan yang demikian, relasi diplomatik kerajaan Bali dan Jawa menjadi semakin erat.

Bukti terjalannya hubungan yang baik antara Bali dan Jawa dapat ditemui dalam Prasasti Pura Batu Madeg (933 Ś/ 1011 M). Prasasti itu menyebut bahwa Pu Bharada, seorang agamawan besar di zaman Airlangga, pernah berkunjung ke Bali (Jaya 2008:143). Selain itu, secara konkret kedua kerajaan ini saling memengaruhi kebudayaan satu sama lain, misalnya bagaimana aksara kuadrat Jawa mulai menyebar di Bali masa itu. Sebaliknya, nama Bali pun sudah disebut di dalam prasasti yang dikeluarkan sejak dari masa sebelum Airlangga (abad ke-10 M) (Nastiti 2016:187-188).

Hubungan Airlangga dengan luar negeri nyatanya juga bukan melulu soal persekutuan. Data sejarah, baik yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia, menyebut bahwa Airlangga terindikasi melakukan penyerangan ke negara tetangganya. Menurut Prasasti

Horrën⁵, Airlangga bermusuhan dengan Kerajaan Sunda di barat Pulau Jawa. Teori ini dipercaya oleh sebagian peneliti mengingat adanya kata *satru sunda*⁶ pada uraian prasasti tersebut, walaupun kemudian narasi ini juga diperdebatkan (Susanti 2010:176).

Di dalam khazanah sejarah kuno Sunda sendiri, masa pemerintahan Airlangga dikatakan sezaman dengan Raja Sri Jayabhupati. Raja ini hanya mengeluarkan satu prasasti (sekarang terdiri dari beberapa fragmen), yaitu Prasasti Sang Hyang Tapak (1030 M). Prasasti ini oleh para peneliti dianggap sebagai penanda bahwa memang di saat itu Airlangga paling tidak telah melakukan kontak dengan Kerajaan Sunda. Munculnya anggapan ini karena prasasti tersebut menggunakan bahasa dan struktur penulisan prasasti Jawa Kuno. Prasasti ini oleh para ahli sebelumnya dijadikan bukti adanya kontak antara Kerajaan Sunda dan pemerintahan kerajaan yang dipimpin Airlangga, yang mana memungkinkan adanya permusuhan antara dua monarki tersebut (Danasasmita 2014:61; Munandar 2017:170-174). Di lain pihak, catatan dari kronik Cina zaman Dinasti Song juga melampirkan keterangan bahwa Airlangga bermusuhan dengan Sriwijaya di Sumatra (Groeneveldt 2018:79).

2. Aspek-aspek dalam Konsep *Aṣṭabrata*

Kata *aṣṭabrata* pada dasarnya berasal dari dua suku kata bahasa Jawa Kuno, yakni *asta* (delapan) dan *brata* (laku). Oleh karena itu, secara harfiah *aṣṭabrata* berarti “laku yang delapan”. Konsep ini awalnya merupakan salah satu kutipan dalam *Kakawin Ramayana* yang berkembang di Jawa sekitar abad ke-9 M.

Kutipan tersebut menceritakan bahwa Rama yang berhasil mengalahkan Rahwana di Alengka mengangkat Wibisana, adik dari Rahwana yang protagonis, untuk menjadi raja baru di Alengka. Wibisana yang mendapat perintah dari Rama itu lantas merasa ragu dan malu, sehingga Rama pun menasehati Wibisana dengan delapan laku yang harus dilakukan seorang raja yang baik. Delapan laku tersebut mengikuti sifat delapan dewa penjaga mata angin (*hastadikpalaka*), yang seluruhnya harus hadir dalam tubuh seorang raja.

Berikut ini merupakan kutipan mengenai *aṣṭabrata* dalam *Kakawin Ramayana sargah* ke-24:

Alih aksara:

Lawan sira kinonaken katwaṇa, apan hana bhaṭāra muṅgwin sira, wwaluṇ hyaṇ apupul ryawak saṇ prabhu, dumeḥ sira mahāprabhāwāsama. Hyaṇ Indra, Yama, Sūrya, Candrānila, Kuwera, Baruna, Agni, nāhan wwalu, sira ta maka angga sang bhūpati, mataṇ niran inisṭi aṣṭabrata. Nihan brata ni saṇ hyaṇ indrālapen, sirāṇ hudanaken tumṛptiṇ jagat, sirāta tuladen ta indrabrata, sudāna ya hudan ta manlyābi rāt. Yamabrata dumaṇḍa karmāhala sirekana maluṇ maling yar pejah, umilwa kita malwaṇ olah salah, asiṇ umawarāṇ sarāt pati. Bhaṭāra Rawi maṇhisep wwai

⁵ Prasasti Horrën dibuat abad ke-11, namun merupakan hasil tulisan ulang di zaman Majapahit.

⁶ *Satru sunda* dapat diartikan sebagai musuhnya Sunda.

lanā, ndatan kara śanaih de nira, samañkana kitāt alap pañguhen, tatar gelisa yeka sūryabrata. Śaśibrata humarsukañ rāt kabeh, ulah ta mṛdu komalā yan katon, geyun ta mamanan ya tulyāmṛta, asiñ matuha pañḍitat swāgatan. Hañin ta kita yat pañinte ulah, kumwruhana budddhi niñ rāt kabeh, sucāra ya panon ta tatan katon, ya dibyaguṇa suksma bāyubrata. Mamuktyañ upabhoga sinambiñ inak, taman panepañeñ pañan mwañ inum, manañḍaṇa mabhūṣaṇamā mahyasa, nahan ta dhanadabratānuñ tirun. Bhaṭāra baruñāngege sañjata, mahāwisa ya nāgapāśānapus, sirāta tuladen ta pāsabrata, kitomapusanañ watek durjana. Lanāñgeseni satru bahnibrata, galak ta ri musuh yēka puya asiñ sainasen taśirñāpasah, ya tekana sināñguh agnibrata. (Boechari 2012a:532-535).

Alih bahasa:

Lantas engkau pun diminta menjadi raja oleh karena adanya sosok para dewa dalam dirimu, yang kehadirannya mengakibatkan dirimu mempunyai kekuasaan luas tiada batas. Dewa Indra, Yama, Surya, Candra, Anila (Vayu), Kuvera, Varuna, Agni, demikianlah mereka membentuk tubuh sang raja, oleh karenanya engkau sanggup menerapkan *aṣṭabrata*. Laku Hyang Indra hendaknya dicontoh, mendatangkan hujan dan menentramkan dunia, menghujankan banyak hadiah hingga membanjiri seluruh jagad. Laku Hyang Yama adalah menghukum perbuatan jahat. Ia memukuli pencuri, apabila (telah) ia mati, (demikianlah) kamu (hendaknya) mengikuti memukul semua perbuatan salah singkirkan semua orang yang berusaha merintangi (ketenteraman) dunia. Bhatara Rawi (Surya) selalu menghisap air, tiada hentinya, per-

lahan-lahan, demikian tindakannya, demikianlah (hendaknya) kamu dalam mengambil “hasil” janganlah tergesa-gesa, itulah perilaku Surya. Laku Dewa Chandra adalah mengembirakan seluruh dunia, hendaknya tingkah lakumu nampak lemah lembut, tertawamu manis bagai *amerta*, hormatilah seluruh orang tua dan seluruh pendeta (cerdik pandai). (Seperti) anginlah jika kamu mengamati-perbuatan, hendaknya (kamu) mengetahui tingkah laku seluruh dunia, pandanglah dengan baik, (namun) tanpa terlihat, begitulah keluhuran sifat dan laku Dewa Vayu. Rasakan (bermacam) kenikmatan yang serba lezat, janganlah membatasi diri dalam hal makanan dan minuman, berdandanlah, berpakaianlah dan bersoleklah, demikianlah Dewa Dhanada (Kuwera). Dewa Baruna menggunakan senjata yang berbisa, yaitu jerat Nagapasa (sebagai) pengikat, dialah yang patut diteladani (sebagai) laku penjerat, kamu (harus) mengikat seluruh penjahat. Wajib dibakar musuh Dewa Agni, ganaslah pada musuh sebagaimana api, barangsiapa kamu serang pasti hancur lebur, hal seperti itulah disebut perilaku Agni. (Munandar 2017:164-169).

3. Diskusi

a. Fungsi Manifes dan Fungsi Laten pada Kebijakan Pemerintahan Airlangga

Merujuk pada pendekatan analisis fungsional Merton yang dilakukan, terdapat enam poin *aṣṭabrata* yang dapat dipenuhi oleh Airlangga. Enam poin *aṣṭabrata* tersebut menandakan bahwa sebagian besar kebijakan Airlangga

merepresentasikan adanya fungsi manifes dari Airlangga sebagai raja.

Poin *aṣṭabrata* yang menyatakan bahwa seorang raja harus memberikan banyak hadiah bagi rakyatnya terpenuhi, antara lain melalui adanya kebijakan *sima makudur* bagi rakyat Airlangga. Melalui kebijakan tersebut Airlangga telah memberikan hak otonom bagi suatu desa untuk terbebas dari pajak negara. Kebijakan *sima makudur* bisa disimpulkan sebagai bentuk fungsi manifes dari Airlangga.

Fungsi manifes Airlangga juga terpenuhi melalui adanya serangkaian pemadaman pemberontakan yang dilakukan secara konsisten oleh Airlangga. Keganasan Airlangga juga tercermin dari langkah invasi Airlangga terhadap Kerajaan Sunda dan Sriwijaya yang berada di wilayah barat Nusantara. Kebijakan invasinya ke luar Pulau Jawa bisa dianggap bahwa Airlangga memenuhi poin berwawasan luas dan memiliki strategi yang bijak.

Poin *aṣṭabrata* pada kebijakan pemerintahan Airlangga yang perlu dikaji lebih lanjut adalah konsep tentang penarikan pajak yang perlahan-lahan. Sebelum menafsirkan apakah poin tersebut terpenuhi di zaman Airlangga, terlebih dahulu perlu dipahami maksud dari penarikan pajak yang perlahan-lahan. Penelitian ini memandang bahwa aspek *aṣṭabrata* ini lekat hubungannya dengan sifat akuntabilitas perpajakan di masa Hindu-Buddha. Artinya, alur pergerakan dana pajak hingga akhirnya sampai pada kas kerajaan haruslah bisa dipertanggung-jawabkan.

Di zaman Hindu-Buddha, pajak tidak serta merta ditarik tanpa alasan.

Pajak ditarik berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh raja. Proses penarikannya pun mengikuti sistem birokrasi yang berlaku di jawatan yang diberi tanggung jawab mengurus perpajakan. Di masa Jawa Kuna, jawatan tersebut dikenal sebagai *maṇilala drabya haji*. Golongan penarik pajak ini bertanggung jawab secara langsung kepada raja, sedangkan raja sendiri bertanggung jawab pada rakyat. Bentuk tanggung jawab raja pada rakyat ditunjukkan melalui penyaluran biaya pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Asumsinya, apabila sirkulasi perkenomian yang demikian dapat berlangsung secara “sehat”, tingkat kepercayaan rakyat untuk membayar pajak pun akan meningkat (Budiasih 2014:271).

Seperti yang dikatakan oleh Boechari (2012b:237-248), ada beberapa pemerintahan raja Jawa Kuno yang terdampak oleh adanya kekacauan sirkulasi pajak. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kesalahan para pemungut pajak. Biasanya, raja yang mendapati kekacauan dalam sirkulasi perpajakan di masa pemerintahannya akan mengeluarkan prasasti *jayapattra* atau maklumat keputusan hukum bagi si wajib pajak atau si pemungut pajak terkait. Kasus seperti ini pernah tercatat pada Prasasti Wurudu Kidul A dan B (922 M), yang menetapkan adanya pernyataan dari raja bahwa pemungut pajaknya telah melakukan kesalahan. Penarik pajak tersebut menarik pajak dari seseorang bernama Sang Dhanadi dengan aturan pajak orang asing, padahal Sang Dhanadi adalah orang Jawa tulen. Dengan pemahaman yang

telah disampaikan melalui contoh tindakan raja terhadap kesalahan perpajakan, maka dapat dinyatakan bahwa Airlangga telah memenuhi fungsi manifestasinya dalam menarik pajak secara perlahan-lahan.

Poin *aṣṭabrata* lain, yakni berperilaku lemah lembut dan menghormati agamawan dan cendekiawan juga perlu diperjelas sebelum bisa ditentukan apakah terpenuhi atau tidak dalam kebijakan Airlangga. Selama masa pemerintahan Airlangga, sering kali ia menyebut soal kedekatan dirinya dengan kaum agamawan. Prasasti Pucangan berbahasa Sansekerta (1037 M) menyebut bahwa Airlangga menaiki takhta dengan restu para brahmana dan biksu Buddha (Coedes 2017:203-204). Di dalam prasasti-prasasti lain, Airlangga juga kerap kali membangun sarana peribadatan baik untuk dewa-dewa Hindu-Buddha maupun untuk dewa lokal masyarakat Jawa.

Seluruh klaim Airlangga di dalam prasasti-prasastinya ini tentu saja belum bisa menunjukkan kedekatannya dengan golongan agamawan. Secara garis besar, sampai sekarang keterangan yang menguatkan kedekatan golongan agamawan dengan Airlangga dapat ditemukan di *Kakawin Arjunawiwaha*. Karya sastra gubahan seorang agamawan bernama Pu Kanwa ini didedikasikan sebagai analogi perjalanan hidup Airlangga (Munoz 2016:350).

Bukti lain juga muncul dari banyaknya mitos di Bali dan Jawa mengenai Airlangga yang sering kali diasosiasikan sebagai raja pendeta. Hal ini tercermin dari penamaannya sebagai Rsi Erlangga Jatiningrat di *Serat Calon Arang* dan Rsi Gentayu

dalam *Babad Tanah Jawi* (Posponegoro dan Notosusanto 2010:280 dan 285). Mitos tentang Airlangga sebagai raja pendeta bisa dikatakan didasari kenyataan, karena dari Prasasti Pasar Legi (1042 M) diketahui bahwa Airlangga mengambil gelar kependetaannya sebagai Aji Paduka Mpungku di penghujung hidupnya (Susanti 2010). Berdasarkan bukti-bukti ini, bisa dikatakan bahwa Airlangga menjalankan fungsi manifestasinya dalam membina hubungan baik dengan golongan agamawan dan cendekiawan.

Di sisi lain, Airlangga menjalankan fungsi latennya melalui kebijakan luar negeri yang ia lakukan. Selama masa pemerintahannya, Airlangga telah menjalankan fungsinya sebagai diplomat yang baik. Aspek ini tidak termasuk ke dalam cakupan kriteria *aṣṭabrata*.

Airlangga menjalankan fungsi latennya tersebut lantaran dua hal, yaitu meneruskan tradisi pendahulunya dan konsekuensi dari kebijakan ekonomi yang ia buat. Di satu sisi, Airlangga menjalin hubungan persahabatan dengan Cina dan Bali karena hubungan tersebut sudah ada sejak sebelum Airlangga naik takhta. Orang Jawa sudah melakukan kegiatan pertukaran komoditas dagang dengan Cina semenjak zaman Dinasti Sailendra di Jawa Tengah di abad ke-8 hingga 10 M (Groeneveldt 2018). Hubungan Jawa dan Bali sebagaimana termaktub dalam Prasasti Pucangan berbahasa Sanskerta (1037), sudah terjalin sejak pernikahan kedua orang tua Airlangga (Susanti 2010). Kebijakan ekonomi Airlangga yang membuka pelabuhan-pelabuhan besar di Surabaya dan Tuban juga telah memancing berbagai macam pedagang

antarbangsa untuk datang ke Jawa. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi terbuka Airlangga ini juga bisa dikatakan merupakan bukti unggulnya posisi Airlangga sebagai seorang diplomat.

b. *Disfungsional* pada Kebijakan Pemerintahan Airlangga

Menurut hasil perbandingan antara kebijakan-kebijakan Airlangga dengan poin-poin raja ideal pada *aṣṭabrata*, terdapat beberapa kebijakan Airlangga yang *disfungsional*. Adapun dari dua poin *aṣṭabrata* yang *disfungsional* yang dimaksud adalah raja sebagai simbol kemegahan dan raja sebagai pembentuk ikatan dengan pihak-pihak yang mengancamnya. Ketidakberhasilan Airlangga memenuhi dua poin dalam *aṣṭabrata* tersebut menandakan bahwa selama Airlangga memimpin pemerintahan, terdapat beberapa aspek yang bersifat *disfungsional*.

Airlangga tidak menonjolkan aspek kemegahan dan kekayaannya sebagai raja. Sebaliknya, ia lebih banyak menunjukkan sisi kesederhanaannya. Fenomena tersebut dibuktikan dari bagaimana Airlangga menarasikan bahwa selama proses menuju takhtanya, ia bertapa dan hidup secara sederhana di hutan bersama abdi setianya. Alasan di balik munculnya narasi ini bisa dipahami, yakni sebagai upaya Airlangga dalam menghindari kecemburuan sosial dari rakyatnya. Raja yang sederhana tentu akan lebih disukai oleh rakyat yang baru saja mengalami bencana (konflik perebutan wilayah), dibandingkan dengan raja yang pamer akan kekayaan.

Merujuk pada analisis fungsionalisme Merton yang telah dijabarkan pada subbab sebelumnya, dapat ditafsirkan bahwa *disfungsional*-nya Airlangga dalam aspek ini didorong oleh adanya *fundamental values* di lapangan. Artinya, Airlangga tidak menjalankan fungsi raja secara normatif demi menghindari timbulnya ketidakpuasan dari rakyatnya, yang bisa saja justru berbalik untuk menggulingkan pemerintahannya.

Berkenaan dengan sisi *disfungsional* Airlangga dalam aspek raja sebagai pembentuk ikatan dengan pihak-pihak yang mengancamnya, dapat diartikan sebagai ketiadaan kebijakan Airlangga melakukan upaya preventif menghadapi kemungkinan munculnya potensi konflik. Airlangga, sebagaimana tersirat dari prasasti-prasastinya, cenderung lebih banyak melakukan tindakan represif dibandingkan tindakan preventif dalam menghadapi musuh-musuhnya. *Disfungsional*-nya Airlangga dalam aspek ini terbukti telah menyebabkan adanya beberapa kasus konflik yang berlarut-larut. Salah satu contohnya adalah ketika ada seorang pemberontak yang tadinya telah ditundukkan, tetapi kemudian memberontak lagi ketika ada kesempatan, yaitu pada kasus Haji Wēngkēr (Susanti 2010). *Disfungsional*-nya Airlangga pada aspek ini pun ditafsirkan sebagai sebab dari adanya konflik suksesi setelah mangkatnya Airlangga, yaitu antara saudara iparnya dan anaknya. Konflik ini disebut sebagai awal kemunculan Kerajaan Kadiri dan Janggala di Jawa Timur (Boechari 2012c:451-452).

D. SIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Airlangga, dapat disimpulkan bahwa selama pemerintahannya Airlangga menjalankan fungsi manifes serta laten di beberapa aspek dan bersifat *disfungsional* di beberapa aspek lain. Dari hasil analisis fungsional Merton tersebut, tidak berlebihan untuk menetapkan bahwa Airlangga hanya menjalankan fungsinya di bidang militer dan perekonomian, terutama melalui invasi-invasi dan kebijakan perpajakan yang ia keluarkan.

Di sisi lain, Airlangga tidak menonjolkan fungsinya sebagai simbol kejayaan negara dan penjaga kestabilan dalam negeri kerajaannya. Oleh karena itu, dari sudut pandang hasil analisis fungsionalisme Merton, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Airlangga belum bisa dikatakan ideal seperti yang digambarkan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Meskipun demikian, tidak dapat dinafikan pula bahwa kajian ini pun tidak serta-merta dapat menetapkan bahwa Airlangga bukanlah raja yang ideal.

Penelitian ini pada dasarnya bersandar pada data sejarah yang sifatnya tidak lengkap, dalam artian bahwa kebijakan Airlangga sampai dilakukannya penelitian ini belum bisa direkonstruksi secara utuh. Bertambahnya temuan prasasti atau manuskrip sejarah pendukung yang senantiasa terjadi, tentu bisa saja mengubah tafsiran akan gaya pemerintahan Airlangga. Hasil dari penelitian ini dengan demikian merupakan tafsiran sementara dari data yang tersedia

mengenai gaya pemerintahan Airlangga.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan lagi tinjauan yang lebih kritis mengenai pemerintahan Airlangga pada penelitian-penelitian yang akan datang. Keterbatasan data dalam penelitian ini, baik secara kuantitas maupun kualitas, juga menjadi kendala untuk menyelidik lebih jauh mengenai sejarah pemerintahan Airlangga. Dengan demikian masih diperlukan adanya kajian-kajian yang lebih mendalam mengenai sumber-sumber sejarah tentang Airlangga.

DAFTAR SUMBER

- Alnoza, Muhamad. 2021. "Arah Kebijakan Raja pada Masa Jawa Kuno Pasca Peristiwa Pralaya dari Sudut Pandang Teori Kontrak Sosial." Prosiding, Balai Arkeologi Jawa Barat tentang Petaka dalam Kehidupan Manusia, Vol.4 (1), 223-33, Balai Arkeologi Jawa Barat, Bandung.
- Boechari. 2012a. "Astabrata." Hlm. 532-35 dalam *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO.
- . 2012b. "Jayapattra: Sekelumit tentang Pelaksanaan Hukum dalam Masyarakat Jawa Kuno." Hlm. 237-48 dalam *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO.

- . 2012c. “The Inscription of Garaman Dated 975 Saka New Evidence on Airlangga’s Partition of His Kingdom.” Hlm. 437-52 dalam *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO.
- Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman. 2014. “Fenomena Akuntabilitas Perpajakan pada Jaman Bali Kuno: Suatu Studi Interpretif.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5(3):409-20.
- Casparis, Johannes Gijbertus de. 1958. “Airlangga.” Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Airlangga, Surabaya.
- Coedes, George. 2017. *Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO.
- Danasasmita, Saleh. 2014. *Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi*. Bandung: Penerbit Kiblat Utama.
- Groeneveldt, Willem Pieter. 2018. *Nusantara dalam Catatan Tionghoa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Haryono, Timbul. 1999. “Sang Hyang Watu Teas dan Sang Hyang Watu Kulumpang: Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima pada Masa Kerajaan Mataram Kuna.” *Humaniora* 11(3):14-21.
- Jaya, Ida Bagus Sapta. 2008. “Pemerintahan Keluarga Warmadewa di Bali serta Hubungannya dengan Jawa Timur.” Hlm. 138-61 dalam *Pusaka Budaya dan Nilai-Nilai Religiusitas*, disunting oleh I. K. Setiawan. Denpasar: Seri Penerbitan Ilmiah Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Kern, Hendrik Caspar. 1917. “Steen van Den Berg Pananggungan (Soerabaja), Thans in ’t Indian Museum Te Calcutta.” *Verspreide Geschriften* VII:85-114.
- Kulke, Hermann. 1978. *Devaraja Cult*. New York: Department of Asian Studies Cornell University.
- Merton, Robert King. 1968. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.
- Moniz, Ariel. 2015. “The End of Days : Tales of Apocalypse Across Time and Space.” *Hohonu* 13:38-42.
- Munandar, A. A. 2017. “Tradisi Pemerintahan dan Konsep Raja Ideal Menurut Pandangan Masyarakat Sunda Kuna Abad Ke-13-16 M.” Hlm. 103-247 dalam *Siliwangi, Sejarah dan Kebudayaan Sunda Kuna*, disunting oleh A. A. Munandar. Jakarta: Wedatama Widyastra.
- Munoz, Paul Michel. 2016. *Early Kingdoms: Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula*. Singapore: Mainland Press.

- Nastiti, Titi Surti. 2016. "Perkembangan Aksara Kwadrat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali: Analisis Paleografi." *Forum Arkeologi* 29(3):175-88.
- Posponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II: Zaman Kuno*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prihatmoko, Hedwi. 2014. "Transportasi Air dalam Perdagangan pada Masa Jawa Kuno di Jawa Timur." *Forum Arkeologi* 27(3):155-74.
- Ratnawati, Lien Dwiari. 1995. "Catatan tentang Adanya 'Orang Asing' pada Masa Jawa Kuno Menurut Data Prasasti." Hlm. 18-23 dalam *Analisis Hasil Penelitian Arkeologi, Analisis Sumber Tertulis Masa Klasik*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Santiko, Hariani. 2015. "Ragam Hias Ular-Naga di Tempat Sakral Periode Jawa Timur." *Amerta: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi* 33(2):89-96.
- Schrieke, B.J.O. 2016. *Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia: Penguasa dan Kerajaan Jawa pada Masa Awal*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. "Memahami Metode Kualitatif." *Makara: Sosial Humaniora* 9(2):57-65.
- Susanti, Ninie. 2010. *Airlangga: Biografi Raja Pembaharu Jawa Abad XI*. Depok: Komunitas Bambu.
- Turner, Jonathan H. dan Alexandra Maryanski. 2010. *Fungsionalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, A. S. 2015. "Ratu Adil Jawa dan Ratu Filsaf Platon: Timbangan dan Aktualisasinya untuk Saat Ini." Hlm. 14-43 dalam *Ratu Adil, Kuasa, dan Pemberontakan di Nusantara*, disunting oleh Dorothea Rosa Herliang, et al. Yogyakarta: Penerbit Ombak.